

## LAMPIRAN

### Pertanyaan

1. Apa pendapat Anda tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024?
2. Bagaimana Anda melihat dampak keputusan ini terhadap kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia?
3. Apakah Anda percaya bahwa keputusan MK mencerminkan prinsip keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu? Mengapa?
4. Dalam pandangan Anda, apa saja faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan MK dalam menolak gugatan tersebut?
5. Bagaimana Anda menilai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam konteks gugatan ini?
6. Apa yang Anda harapkan dari lembaga-lembaga pemilu di Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu ke depan?
7. Sejauh mana Anda melihat adanya intervensi dari pihak eksekutif dalam proses pemilu, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hasil pemilu?
8. Apa langkah-langkah yang perlu diambil oleh masyarakat sipil untuk memastikan pemilu yang lebih adil dan transparan di masa depan?
9. Bagaimana Anda menanggapi dissenting opinion dari hakim-hakim MK yang menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil?
10. Apa pesan Anda kepada para pemilih dan calon pemimpin terkait dengan situasi pemilu saat ini?

## Hasil Wawancara

P: Apa pendapat Anda tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024?

I: Sebenarnya keputusannya menimbulkan banyak pertanyaan khususnya di masyarakat, karena banyak yang menganggap putusan ini menunjukkan konsistensi hukum, tapi tidak sedikit juga masyarakat yang kecewa karena merasa bukti-bukti kecurangan tidak dipertimbangkan secara maksimal. Jika ada indikasi pelanggaran serius, seharusnya MK lebih transparan dalam menjelaskan dasar keputusan mereka, bukan hanya menolaknya secara keseluruhan tanpa membuka ruang evaluasi yang lebih luas.

P: Bagaimana Anda melihat dampak keputusan ini terhadap kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia?

I :Kepercayaan publik terhadap pemilu di Indonesia jelas terpengaruh oleh keputusan ini. Jika proses hukum terlihat tidak memberikan ruang bagi transparansi dan keadilan, masyarakat bisa semakin apatis terhadap sistem demokrasi. Banyak pemilih yang merasa suara mereka tidak benar-benar dihitung secara adil, apalagi jika ada dugaan ketidaknetralan penyelenggara pemilu.

P: Apakah Anda percaya bahwa keputusan MK mencerminkan prinsip keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu? Mengapa?

I : Prinsip keadilan dan integritas dalam pemilu seharusnya menjadi dasar utama keputusan MK, tetapi banyak masyarakat yang meragukan hal itu terlebih adanya kasus ini. Kalau MK memang bekerja secara independen, semestinya ada pertimbangan yang lebih kuat terhadap semua aspek gugatan, bukan sekadar menolaknya dengan alasan formalitas. Menurut saya, keputusan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pemilu masih sulit dijangkau bagi mereka yang merasa dirugikan.

P: Dalam pandangan Anda, apa saja faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan MK dalam menolak gugatan tersebut?

I: Banyak pastinya, mungkin yang mempengaruhi keputusan MK antara lain tekanan politik, kepentingan kekuasaan, serta kurangnya bukti kuat yang mampu membuktikan adanya pelanggaran yang signifikan. Kalau terbukti faktor politik lebih dominan daripada aspek hukum, hal ini berbahaya bagi independensi lembaga peradilan dan masa depan demokrasi di Indonesia.

P: Bagaimana Anda menilai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam konteks gugatan ini?

I: Peran Bawaslu dan DKPP dalam gugatan ini patut dipertanyakan karena seharusnya mereka menjadi garda terdepan dalam memastikan pemilu yang jujur dan adil. Namun, jika kedua lembaga ini tidak bersikap tegas terhadap dugaan kecurangan sejak awal, maka proses pemilu sudah cacat sejak sebelum gugatan diajukan ke MK. Masyarakat membutuhkan lembaga pengawas yang benar-benar berani bersikap netral dan profesional.

P: Apa yang Anda harapkan dari lembaga-lembaga pemilu di Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu ke depan?

I: Lembaga penyelenggara harus lebih terbuka dalam proses perhitungan suara dan penanganan pelanggaran. Pengawasan independen juga harus diperkuat, baik dari masyarakat sipil maupun lembaga internasional, agar tidak ada celah bagi kecurangan sistematis yang menguntungkan pihak tertentu.

P: Sejauh mana Anda melihat adanya intervensi dari pihak eksekutif dalam proses pemilu, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hasil pemilu?

I: Intervensi eksekutif dalam pemilu sering menjadi isu tapi sulit dibuktikan, sebenarnya dampaknya bisa sangat besar dalam mempengaruhi hasil pemilu. Jika ada indikasi campur tangan dalam bentuk mobilisasi sumber daya negara, tekanan terhadap lembaga hukum, atau keberpihakan aparaturnegara, maka hasil pemilu bisa saja mencerminkan kekuasaan, bukan pilihan rakyat.

P: Apa langkah-langkah yang perlu diambil oleh masyarakat sipil untuk memastikan pemilu yang lebih adil dan transparan di masa depan?

I: Masyarakat sipil harus lebih aktif dalam mengawasi proses pemilu, mulai dari pencoblosan hingga perhitungan suara. Selain itu, edukasi politik juga penting agar pemilih lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang atau propaganda yang menyesatkan. Gerakan sosial yang menuntut transparansi juga perlu diperkuat agar pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang.

P: Bagaimana Anda menanggapi dissenting opinion dari hakim-hakim MK yang menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil?

I: Dissenting opinion dari hakim-hakim MK yang menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil adalah sinyal bahwa ada ketidakpuasan di dalam lembaga itu sendiri. Pendapat mereka seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi publik dalam menilai kredibilitas putusan MK secara keseluruhan. Jika ada hakim yang berani berbeda pendapat, artinya memang ada masalah dalam proses pemilu yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

P: Apa pesan Anda kepada para pemilih dan calon pemimpin terkait dengan situasi pemilu saat ini?

I: Menurut saya, kepada para pemilih dan calon pemimpin, situasi ini harus menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi tidak hanya soal memilih, tetapi juga mengawal prosesnya agar tetap bersih dan adil. Pemilih harus tetap kritis dan tidak mudah puas dengan hasil yang dianggap meragukan, sementara calon pemimpin harus berani bertarung dengan cara yang jujur tanpa mengandalkan manipulasi sistem demi kekuasaan.



*Gambar 1 Informan 1*

## **Informan 2**

P: Apa pendapat Anda tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024?

I: Saya melihat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 sebagai sebuah keputusan yang harus dihormati, tetapi tetap perlu dikritisi secara akademis. Dari perspektif hukum, MK memiliki kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilu berdasarkan konstitusi dan peraturan yang berlaku. Jika MK menolak gugatan, berarti mereka menilai bahwa bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Namun, dari sudut pandang demokrasi, keputusan ini menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu kita.

Sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk tetap kritis terhadap setiap proses hukum dan politik yang terjadi. Keputusan MK seharusnya tidak hanya dilihat sebagai akhir dari perdebatan, tetapi juga sebagai momentum untuk mengevaluasi sistem pemilu, memperkuat mekanisme pengawasan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Yang terpenting, kita harus memastikan bahwa pemilu di masa depan berlangsung dengan lebih transparan, adil, dan berintegritas.

P: Bagaimana Anda melihat dampak keputusan ini terhadap kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia?

I: Saya melihat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 memiliki dampak yang kompleks terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu di Indonesia.

Di satu sisi, keputusan ini bisa memperkuat legitimasi hasil pemilu jika masyarakat merasa bahwa MK telah menjalankan tugasnya secara independen dan berdasarkan bukti yang kuat. Hal ini bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan proses demokrasi secara keseluruhan.

Namun, di sisi lain, jika masih ada keraguan di masyarakat mengenai transparansi dan keadilan pemilu, keputusan ini justru bisa memperlemah kepercayaan terhadap sistem politik. Apalagi jika masyarakat merasa bahwa ada dugaan kecurangan yang tidak ditindaklanjuti dengan baik. Sikap skeptis ini bisa berujung pada menurunnya partisipasi politik di masa depan, baik dalam pemilu maupun dalam keterlibatan politik lainnya.

Oleh karena itu, menurut saya, pasca keputusan MK, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil harus berusaha memperbaiki sistem pemilu, meningkatkan transparansi, serta membangun kembali kepercayaan publik agar demokrasi di Indonesia semakin kuat.

P : Apakah Anda percaya bahwa keputusan MK mencerminkan prinsip keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu? Mengapa?

I : Saya melihat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 perlu dianalisis dari dua perspektif utama: prinsip keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Dari sisi prinsip keadilan, MK seharusnya menjadi lembaga yang memastikan bahwa setiap proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Jika putusan MK didasarkan pada bukti yang jelas dan pertimbangan hukum yang objektif, maka keputusan tersebut bisa dikatakan mencerminkan keadilan. Namun, jika masih ada pertanyaan atau kekhawatiran publik mengenai independensi hakim atau proses persidangan yang dianggap kurang transparan, maka muncul ruang untuk meragukan apakah keadilan benar-benar ditegakkan. Sementara itu, dari sisi integritas, keputusan MK seharusnya menjadi cerminan dari sistem pemilu yang bersih dan dapat dipercaya. Namun, apabila masih ada dugaan ketidakwajaran dalam proses pemilu yang tidak sepenuhnya dijawab dalam persidangan, maka wajar jika sebagian masyarakat merasa bahwa integritas pemilu belum sepenuhnya terjamin. Dengan demikian, saya berpandangan bahwa keputusan MK idealnya harus mampu menjawab segala bentuk keraguan publik dengan argumentasi hukum yang kuat dan transparan. Jika tidak, maka kepercayaan

masyarakat terhadap demokrasi bisa terganggu, dan ini menjadi tantangan bagi Indonesia dalam memperkuat sistem politik yang lebih adil dan berintegritas.

P: Dalam pandangan Anda, apa saja faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan MK dalam menolak gugatan tersebut?

I: Saya melihat beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menolak gugatan sengketa Pilpres 2024:

**Kekuatan Bukti** – MK hanya dapat mengabulkan gugatan jika ada bukti yang kuat bahwa pelanggaran yang terjadi berdampak signifikan pada hasil pemilu. Jika bukti tidak cukup, maka gugatan sulit diterima.

**Aspek Hukum dan Prosedural** – MK terikat oleh aturan hukum yang ketat. Jika gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formal atau substansinya tidak cukup, maka MK berhak menolaknya.

**Independensi dan Tekanan Politik** – Meskipun MK seharusnya independen, tidak bisa dipungkiri bahwa ada potensi tekanan politik, baik dari pemerintah, partai politik, maupun opini publik. **Preseden Putusan Sebelumnya** – MK mungkin mempertimbangkan keputusan-keputusan sebelumnya dalam sengketa pemilu untuk menjaga konsistensi hukum. **Stabilitas Politik dan Demokrasi** – MK mungkin mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari keputusannya, terutama dalam menjaga stabilitas nasional pasca pemilu.

Faktor-faktor ini berperan dalam bagaimana MK memutuskan perkara, dan sebagai mahasiswa, kita perlu terus mengawal agar keputusan yang diambil tetap berdasarkan keadilan dan konstitusi.

P : Bagaimana Anda menilai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam konteks gugatan ini?

I : Saya menilai peran Bawaslu dan DKPP dalam gugatan sengketa Pilpres 2024 sangat penting, tetapi masih menyisakan tantangan.

Bawaslu memiliki tugas utama dalam mengawasi jalannya pemilu dan menangani pelanggaran. Jika mereka secara tegas menindak dugaan kecurangan sebelum dan selama pemilu, maka sengketa di MK bisa diminimalisir. Namun, jika pengawasan dianggap lemah atau tidak efektif, kepercayaan publik terhadap pemilu bisa terganggu.

DKPP bertugas menegakkan etika penyelenggara pemilu. Jika ada pelanggaran etik oleh KPU atau Bawaslu, DKPP harus bertindak tegas untuk memastikan integritas penyelenggara pemilu tetap terjaga.

Dalam konteks gugatan ini, efektivitas kedua lembaga ini dalam menindak pelanggaran menjadi sorotan. Jika kinerja mereka optimal, maka proses pemilu akan lebih kredibel dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

P : Apa yang Anda harapkan dari lembaga-lembaga pemilu di Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu ke depan?

I : Saya berharap lembaga-lembaga pemilu di Indonesia, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan beberapa langkah konkret:

Digitalisasi dan Akses Data Publik – Hasil pemilu dan proses rekapitulasi suara harus lebih terbuka dan mudah diakses masyarakat untuk mencegah kecurigaan manipulasi data. Penguatan Pengawasan Independen –

Memperkuat peran pengawas independen dan masyarakat sipil agar pemilu berjalan lebih transparan dan objektif.

Peningkatan Kapasitas dan Integritas Penyelenggara Pemilu – Memastikan semua petugas pemilu bekerja profesional, bebas dari tekanan politik, serta memiliki kode etik yang kuat.

Respons Cepat terhadap Dugaan Kecurangan – Bawaslu dan DKPP harus lebih cepat dan tegas dalam menangani laporan pelanggaran agar tidak menumpuk di MK.

Edukasi Politik bagi Masyarakat – Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang proses pemilu agar mereka bisa lebih aktif dalam mengawasi jalannya demokrasi.

Jika langkah-langkah ini dilakukan, saya yakin kepercayaan publik terhadap pemilu akan semakin meningkat.

P: Sejauh mana Anda melihat adanya intervensi dari pihak eksekutif dalam proses pemilu, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hasil pemilu?

I: saya melihat bahwa potensi intervensi eksekutif dalam proses pemilu selalu menjadi isu sensitif yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

Penyalahgunaan Aparatur Negara – Jika eksekutif menggunakan sumber daya negara, seperti birokrasi, aparat keamanan, atau anggaran publik untuk kepentingan politik, maka kompetisi menjadi tidak adil.

Netralitas Penyelenggara Pemilu – Jika ada tekanan dari eksekutif terhadap KPU, Bawaslu, atau MK, maka independensi lembaga-lembaga ini bisa terancam, yang berdampak pada kredibilitas hasil pemilu.

Media dan Opini Publik – Eksekutif yang memiliki kontrol atas media pemerintah bisa membentuk opini publik yang menguntungkan salah satu pihak, sehingga memengaruhi preferensi pemilih.

Pengaruh Kebijakan dan Program Bantuan – Kebijakan populis yang diluncurkan menjelang pemilu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan elektabilitas petahana atau kandidat yang didukung pemerintah. Jika intervensi ini terjadi secara masif, maka keadilan dan integritas pemilu terancam, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan.

P: Apa langkah-langkah yang perlu diambil oleh masyarakat sipil untuk memastikan pemilu yang lebih adil dan transparan di masa depan?

I: Saya melihat masyarakat sipil perlu mengambil langkah-langkah berikut untuk memastikan pemilu yang lebih adil dan transparan:

Pengawasan Independen – Aktif dalam pemantauan pemilu melalui lembaga independen atau inisiatif warga.

Edukasi Pemilih – Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak pilih dan bahaya politik uang.

Advokasi dan Pelaporan – Melaporkan pelanggaran pemilu dan menekan lembaga terkait untuk bertindak tegas.

Transparansi Digital – Memanfaatkan teknologi untuk memantau proses pemilu dan penyebaran informasi.

Partisipasi Politik Aktif – Mendorong diskusi kritis dan keterlibatan dalam kebijakan publik.

Dengan langkah-langkah ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga demokrasi yang bersih dan berintegritas.

P: Bagaimana Anda menanggapi dissenting opinion dari hakim-hakim MK yang menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil?

I : Sebagai mahasiswa yang peduli terhadap demokrasi, saya melihat dissenting opinion dari hakim-hakim MK sebagai suara kritis yang menegaskan pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Pendapat berbeda ini menunjukkan bahwa ada aspek yang masih diperdebatkan dalam proses pemilu, terutama terkait transparansi dan integritas. Dissenting opinion juga menjadi pengingat bahwa hukum tidak selalu hitam-putih dan ada ruang untuk interpretasi yang lebih berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar formalitas hukum. Oleh karena itu, pendapat minoritas ini seharusnya menjadi bahan refleksi bagi penyelenggara pemilu agar sistem demokrasi ke depan lebih kuat dan dipercaya oleh rakyat.

P: Apa pesan Anda kepada para pemilih dan calon pemimpin terkait dengan situasi pemilu saat ini?

I: Untuk pemilih: Tetap kritis, jangan terjebak politik uang, dan terus kawal demokrasi dengan aktif berpartisipasi serta mengawasi jalannya pemilu.

Untuk calon pemimpin: Utamakan kejujuran, transparansi, dan kepentingan rakyat di atas ambisi pribadi. Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud dengan kompetisi yang adil dan berintegritas.



*Gambar 2 Informan 2*

### **Informan 3**

P: Apa pendapat Anda tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024?

I: Salah satu aspek menarik dari putusan ini adalah adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari tiga hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia terdapat dissenting opinion, yang menunjukkan dinamika dan independensi dalam tubuh MK. dampak keputusan ini terhadap kepercayaan publik akan sangat bergantung pada bagaimana para pemangku kepentingan—termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil—menyikapi hasil dan proses yang telah berjalan. Jika ada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem pemilu, maka kepercayaan publik dapat dipulihkan atau bahkan diperkuat.

Secara hukum, keputusan MK tetap sah dan mengikat. Namun, apakah keputusan ini sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan integritas pemilu? Jawabannya bergantung pada perspektif masing-masing pihak. Jika keadilan

hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan hukum, maka putusan ini sah dan mencerminkan sistem yang berjalan. Namun, jika keadilan diukur dari persepsi masyarakat terhadap fairness dalam pemilu, maka keputusan ini masih menyisakan pertanyaan besar yang perlu dijawab dengan reformasi pemilu dan penguatan institusi demokrasi di Indonesia.

**Kurangnya Bukti yang Kuat:** Dalam sengketa hasil pemilu, pemohon harus mampu membuktikan bahwa terdapat pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang berdampak signifikan terhadap hasil pemilu. Jika MK menilai bukti yang diajukan tidak cukup kuat atau tidak memenuhi standar ini, maka gugatan bisa ditolak. Perbedaan pendapat di antara hakim MK (dissenting opinion) menunjukkan bahwa ada perdebatan internal yang cukup serius dalam menilai gugatan. Namun, keputusan mayoritas tetap menentukan hasil akhir.

**P:** Bagaimana Anda menilai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam konteks gugatan ini?

**I:** Secara keseluruhan, peran Bawaslu dan DKPP dalam gugatan Pilpres 2024 cukup signifikan, tetapi terbatas oleh kewenangan masing-masing. Jika kewenangan mereka diperkuat dan koordinasi antar lembaga lebih baik, maka sengketa pemilu di masa depan bisa diminimalkan sejak tahap awal.

**P:** Apa yang Anda harapkan dari lembaga-lembaga pemilu di Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu ke depan?

**I:** Penguatan Sistem E-Rekap: KPU harus memastikan sistem rekapitulasi elektronik (Sirekap) berfungsi dengan baik, transparan, dan bebas dari manipulasi. Audit

independen terhadap sistem ini sebelum dan sesudah pemilu dapat meningkatkan kepercayaan publik. Akses Data yang Lebih Terbuka: Data pemilih, hasil rekapitulasi suara, dan keputusan-keputusan penting sebaiknya lebih mudah diakses publik secara real-time untuk mencegah spekulasi atau ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu. Jika KPU, Bawaslu, dan DKPP dapat meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta memastikan akuntabilitas dalam setiap tahap pemilu, maka kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia dapat diperkuat. Reformasi sistem pemilu yang lebih inklusif dan berbasis teknologi juga dapat membantu mengurangi potensi sengketa dan kecurangan di masa depan.

P: Sejauh mana Anda melihat adanya intervensi dari pihak eksekutif dalam proses pemilu, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hasil pemilu?

I. Mobilisasi Anggaran dan Bantuan Sosial (Bansos) Penggunaan bansos untuk kepentingan elektoral adalah salah satu bentuk intervensi yang sering diperdebatkan. Jika distribusi bansos meningkat drastis menjelang pemilu dan diarahkan untuk menguntungkan calon tertentu, ini bisa menjadi strategi politik terselubung. Pengaruh terhadap Lembaga Pemilu. Jika eksekutif memiliki kendali atau pengaruh yang signifikan terhadap KPU, Bawaslu, atau bahkan Mahkamah Konstitusi, maka independensi lembaga-lembaga ini bisa terancam. Intervensi eksekutif dalam pemilu adalah tantangan yang nyata dalam demokrasi, terutama jika terjadi dalam bentuk penyalahgunaan sumber daya negara atau tekanan terhadap lembaga pemilu. Jika tidak dikontrol, hal ini bisa mempengaruhi hasil pemilu secara tidak adil dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem

demokrasi. Oleh karena itu, penguatan lembaga pemilu, transparansi dalam pemerintahan, serta pengawasan publik yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan pemilu yang jujur dan adil di masa depan.

P : Apa langkah-langkah yang perlu diambil oleh masyarakat sipil untuk memastikan pemilu yang lebih adil dan transparan di masa depan?

I: Memanfaatkan Teknologi untuk Pengawasan Menggunakan platform crowdsourcing seperti KawalPemilu.org atau media sosial untuk mendokumentasikan dan melaporkan dugaan kecurangan secara real-time. Mendorong Transparansi Data Pemilu<sup>[1]</sup>Mendesak KPU agar membuka data hasil pemilu secara lebih transparan, misalnya dengan memastikan publik dapat mengakses data rekapitulasi di setiap TPS. Peran masyarakat sipil sangat krusial dalam menjaga pemilu yang adil dan transparan. Dengan pengawasan ketat, edukasi pemilih, advokasi kebijakan, serta partisipasi aktif dalam politik, pemilu di Indonesia dapat semakin demokratis dan kredibel di masa depan.

P: Bagaimana Anda menanggapi dissenting opinion dari hakim-hakim MK yang menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil?

I: Dissenting opinion dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil mencerminkan adanya perbedaan pandangan dalam menilai sengketa Pilpres 2024. Pendapat berbeda ini penting dalam sistem peradilan karena menunjukkan bahwa keputusan MK tidak selalu bulat dan bahwa ada aspek-aspek tertentu yang masih menjadi perdebatan, terutama terkait prinsip keadilan dalam pemilu. Dissenting opinion dari hakim-

hakim MK yang menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil harus dilihat sebagai bahan refleksi bagi sistem demokrasi di Indonesia. Meskipun tidak mengubah hasil putusan utama, pandangan berbeda ini berfungsi sebagai kritik konstruktif yang bisa dijadikan dasar untuk mendorong perbaikan regulasi, peningkatan transparansi, serta penguatan pengawasan pemilu di masa depan.

P: Apa pesan Anda kepada para pemilih dan calon pemimpin terkait dengan situasi pemilu saat ini?

I: Jangan Apatis, Tetap Terlibat dalam Demokrasi Pemilu adalah hak sekaligus tanggung jawab. Meskipun ada berbagai tantangan dalam sistem pemilu, tetaplah aktif berpartisipasi, baik dalam pemilihan maupun dalam mengawasi jalannya proses demokrasi.

Pilih dengan Kesadaran, Bukan Hanya Emosi atau Janji Manis. Jangan mudah terpengaruh oleh propaganda, politik identitas, atau janji kampanye yang tidak realistis. Teliti rekam jejak dan program kerja setiap calon sebelum menjatuhkan pilihan.

Jaga Kejujuran dan Tolak Politik Uang Politik uang dan manipulasi suara hanya akan merusak masa depan demokrasi. Pemilih harus berani menolak segala bentuk suap atau tekanan politik yang mengancam independensi suara mereka.

Utamakan Kepentingan Rakyat, Bukan Kepentingan Pribadi atau Kelompok Kepemimpinan sejati bukan soal menang dalam pemilu, tetapi bagaimana mengemban amanah untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Menang dengan Integritas, Bukan dengan Manipulasi Pemilu bukan sekadar kompetisi untuk meraih kekuasaan, tetapi juga ujian moral. Jangan menggunakan cara-cara curang, penyalahgunaan sumber daya negara, atau intimidasi untuk memenangkan pemilu.

Bangun Politik yang Bermartabat dan Berorientasi pada Solusi Hindari kampanye hitam, ujaran kebencian, dan politik identitas yang hanya memecah belah bangsa. Tawarkan gagasan konkret, kebijakan berbasis data, dan solusi nyata untuk permasalahan yang dihadapi masyarakat.



*Gambar 3 Informan 3*

**Informan 4**

P: Pendapat tentang keputusan MK yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024?

I: Keputusan MK tersebut menunjukkan bahwa proses pemilu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun keputusan ini mungkin mengecewakan bagi beberapa pihak yang mengajukan gugatan, keputusan MK seharusnya dihormati karena lembaga ini bertugas untuk memastikan keadilan dan kelancaran jalannya pemilu.

P:Dampak keputusan ini terhadap kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia?

I: Keputusan MK bisa mempengaruhi kepercayaan publik, terutama bagi mereka yang tidak puas dengan hasilnya. Namun, jika keputusan tersebut dianggap objektif dan berbasis pada bukti yang kuat, diharapkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu tetap terjaga.

P: Apakah keputusan MK mencerminkan prinsip keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu?

I: Keputusan MK seharusnya mencerminkan prinsip keadilan dan integritas karena MK adalah lembaga yang berwenang untuk menilai kesahihan hasil pemilu. Jika keputusan MK didasarkan pada hukum dan bukti yang jelas, maka dapat dianggap mencerminkan prinsip tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keputusan MK menolak gugatan:

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan MK antara lain ketersediaan bukti yang valid, legalitas gugatan, serta prosedur yang dijalani dalam proses hukum. Keputusan MK juga dipengaruhi oleh analisis objektif terhadap argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Penilaian terhadap peran Bawaslu dan DKPP dalam konteks gugatan ini?

Bawaslu dan DKPP memiliki peran penting dalam memastikan proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Keduanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu serta mengatasi pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks gugatan ini, kedua lembaga tersebut berperan dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.

P: Harapan terhadap lembaga-lembaga pemilu di Indonesia?

I: Lembaga pemilu di Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pemilu. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

P: Adanya intervensi pihak eksekutif dalam proses pemilu?

I: Intervensi pihak eksekutif dalam proses pemilu seharusnya dihindari karena bisa memengaruhi independensi dan hasil pemilu. Pengaruh dari pihak eksekutif bisa merusak kepercayaan publik jika dianggap mengarah pada kepentingan tertentu.

P: Langkah-langkah yang perlu diambil oleh masyarakat sipil untuk memastikan pemilu lebih adil dan transparan:

I: Masyarakat sipil dapat berperan aktif dengan memantau dan mengawasi jalannya pemilu, menyuarakan pentingnya keadilan, dan melaporkan segala bentuk kecurangan atau pelanggaran. Edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dalam pemilu juga sangat penting.

P: Menanggapi dissenting opinion dari hakim-hakim MK yang menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil?

I: Dissenting opinion yang menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil sebaiknya dihormati, karena ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kualitas demokrasi. Walaupun tidak sependapat dengan keputusan mayoritas, pandangan ini tetap relevan dalam mendorong perbaikan sistem pemilu.

P: Pesan untuk pemilih dan calon pemimpin terkait situasi pemilu saat ini?

I: Pemilih harus memilih dengan bijak, berdasarkan informasi yang jelas dan transparan, serta mengutamakan kepentingan bangsa. Calon pemimpin harus berkomitmen untuk menjalankan proses pemilu dengan jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.



*Gambar 4 Informan 4*

### **Informan 5**

P Apa pendapat Anda tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024?

I; Pendapat saya, sah saja penolakan terhadap gugatan terhadap sengketa pilpres 2024, karna penolakan didasarkan dari bawaslu, dan bawaslu sendiri mengatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan pada mereka (01&03) kurang kuat. Jika memang secara rasional memang kurang kuat, maka sah-sah saja.

P; Bagaimana Anda melihat dampak keputusan ini terhadap kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia?

I: Dampak keputusan ini sangat buruk, karna bukan keputusannya tapi karna transparansi, contohnya seperti soal bansos. Seperti dalam berita yang di up oleh BBC, bansos adalah alat untuk mengkampanyekan 02, padahal penyaluran bansos

sudah direncanakan RAPBN. Dalam kasus bansos ini tidak bisa membuktikan adanya KKN, hingga Bawaslu sendiri tidak bisa mencari bukti dari bansos tersebut.

P: Apakah Anda percaya bahwa keputusan MK mencerminkan prinsip keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu? Mengapa?

I: Sejujurnya saya percaya, jika MK dan Bawaslu bertindak secara rasional. Saya khawatir dari kedua lembaga adanya dugaan KKN, yang akan merusak integritas dan keadilan di negeri kita. Semoga Bawaslu lebih transparan dari tuduhan-tuduhan yang ada, jangan membuat Bawaslu memihak salah satu paslon saja, hanya karena memihak satu paslon saja.

P: Dalam pandangan Anda, apa saja faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan MK dalam menolak gugatan tersebut?

I: Dalam pandangan saya simple, jika berbicara soal idealnya faktirnya dari Bawaslu dan putusan dari MK sendiri, tapi khawatir akan adanya KKN. Jika hanya menuduh-nuduh saja tanpa bukti hanya akan menciptakan ketidakstabilan politik

P: Bagaimana Anda menilai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam konteks gugatan ini?

I: Untuk Bawaslu, kurangnya transparansi kepada masyarakat, saya sebagai Mahasiswa dan tidak melihat berita dari BBC.News bahwa bansos dijadikan alat kampanye kepada paslon 02, setelah saya melihat dan membaca berita BBC.News bahwa bansos sudah direncanakan. Jika tidak ada informasi yang jelas, akan terciptanya ketidakpercayaan masyarakat. Untuk DKPP, kurang lebih sama

P: Apa yang Anda harapkan dari lembaga-lembaga pemilu di Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu ke depan?

I : Lembaga-lembaga harus menjunjung tinggi transparansi dan meningkatkan cara, bagaimana mereka harus menggunakan bahasa yang sederhana dengan bahasa politik dan bahasa akademisi, salah satu cara dengan cara media digital, dengan adanya influencer, atau pun tokoh politik, harus menggunakan bahasa yang mudah dicerna masyarakat.

P: Sejauh mana Anda melihat adanya intervensi dari pihak eksekutif dalam proses pemilu, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hasil pemilu?

I: Menurut saya, jika tak ada intervensi itu sulit sekali, karna masalah ini multiversi, karna beberapa ASN mengikuti kampanye 02, dan mendapatkan Bansos, jadi menurut saya sampai sejauh keambiguan dalam masalah ini.

P: Apa langkah-langkah yang perlu diambil oleh masyarakat sipil untuk memastikan pemilu yang lebih adil dan transparan di masa depan?

I; Untuk mahasiswa dan masyarakat, silahkan cari wadah-wadah untuk berdiskusi politik, jika mahasiswa biasanya ada dalam organisasi kampus, seperti hima, BEM, BLM dsb. Jika masyarakat sipil di lembaga pembedayaan masyarakat, jika masih ambigu di viralkan dan memberitahu lembaga-lembaga yang berwenang

P: Bagaimana Anda menanggapi dissenting opinion dari hakim-hakim MK yang menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil?

I; Menurut saya setuju dengan mereka, konteks dalam dissenting opinion, mereka harus didasarkan dalam bukti yang konkrit, supaya tidak terciptanya keambiguan

P: Apa pesan Anda kepada para pemilih dan calon pemimpin terkait dengan situasi pemilu saat ini?

I: Menurut saya harus mengikuti diri sendiri dan kampanye dari setiap paslon, jika ada keraguan atau bukti kecurangan dengan suatu paslon, lapor kepada lembaga yang berwenang



*Gambar 5 Informan 5*

### **Informan 6**

P: Apa pendapat Anda tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024?

I: Namun dalam sudut pandang saya apabila tolakannya memiliki alasan yang logis dan gugatannya diajukan secara mentah, maka hal tersebut adalah wajar. Tapi apabila memang gugatan tersebut tidak dilakukan penindakan sama sekali dan ditolak mentah, itu merupakan keputusan yang sangat mengkhawatirkan. Bagaimana Anda melihat dampak keputusan ini terhadap kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia?

Tentunya jika suatu keputusan diambil tanpa pertimbangan yang mendalam dapat menurunkan kepercayaan masyarakat

P: Apakah Anda percaya bahwa keputusan MK mencerminkan prinsip keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu? Mengapa?

I: Saya kurang mengikuti mengenai bagaimana pertimbangan MK sehingga memutuskan untuk menolak gugatan. Namun jika memang gugatannya tidak memiliki bukti yang kuat, maka cukup masuk akal. Tetapi seharusnya perlu ada pemeriksaan terhadap pihak tergugat

P: Dalam pandangan Anda, apa saja faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan MK dalam menolak gugatan tersebut?

I: Bukti dan kejelasan gugatan. Namun ada beberapa konspirasi di masyarakat terkait kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak MK (tidak berniat menyebarkan berita bohong)

P; Bagaimana Anda menilai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam konteks gugatan ini?

I: Terlihat dalam beberapa berita, bawaslu melakukan pemeriksaan dan rapat. Namun saya tidak tahu mengenai hasil kinerjanya.

P: Apa yang Anda harapkan dari lembaga-lembaga pemilu di Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu ke depan?

I: Pemeriksaan yang komprehensif, namun tentunya diperlukan orang yang kebal kolusi.

P: Sejauh mana Anda melihat adanya intervensi dari pihak eksekutif dalam proses pemilu, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hasil pemilu?

I: Tentunya jika pihak eksekutif (dalam kasus ini presiden) turut campur dengan mendukung salah satu kandidat, akan sangat mendukung perolehan suaranya.

P: Apa langkah-langkah yang perlu diambil oleh masyarakat sipil untuk memastikan pemilu yang lebih adil dan transparan di masa depan?

I: Tentu yang pertama adalah terlibat dalam pemilu di kawasan masing<sup>2</sup>. Kemudian apabila bisa, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk melihat kecurangan yang mungkin dilakukan dan mengolah berita<sup>2</sup> yang didapat dengan baik sehingga tidak mudah tergiring oleh oknum.

P: Bagaimana Anda menanggapi dissenting opinion dari hakim-hakim MK yang menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil?

I: Hakim tentunya pertahanan utama dalam kasus ini. Jika hakimnya sendiri melakukan tindakan kolusi, lantas bagaimana negara bisa keluar dari kebobrokannya.

P: Apa pesan Anda kepada para pemilih dan calon pemimpin terkait dengan situasi pemilu saat ini?

I: Jangan mudah tergiring opini, apalagi tertipu dengan media yang tidak valid. Sudah saatnya masyarakat meleak politik. Jangan cuek terhadap negara sendiri. Untuk calon pemimpin, kemenangan bukan segalanya, ada jutaan rakyat yg menjadi tanggung jawab.



*Gambar 6 Informan 6*